

Strategi komunikasi Direktorat Penyiaran dalam mengkomunikasikan peraturan dan kebijakan proses perizinan penyiaran (studi evaluatif pada Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Adelisa Pratiwi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20302524&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya ketidakmengertian penyelenggara penyiaran terhadap peraturan dan kebijakan proses perizinan penyiaran yang oleh sebab itu perlu adanya strategi komunikasi dari Direktorat Penyiaran dalam mengkomunikasikan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi strategi komunikasi Direktorat Penyiaran dalam mengkomunikasikan peraturan dan kebijakan proses perizinan penyiaran.

Metodologi penelitian menggunakan paradigma konstruktivis pada pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif serta strategi sosial konstruksionisme. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan perencanaan yang ada. Disimpulkan bahwa strategi komunikasi sudah berjalan dengan baik namun pelaksanaan perizinan belum optimal karena kendala wilayah Indonesia yang luas, kurangnya SDM Direktorat Penyiaran, sulitnya waktu koordinasi serta belum adanya sistem database yang berbasis IT.

<hr>

ABSTRACT

This research based on by ignorance from many broadcasting organizer of the regulation and licensing of broadcasting policy process and therefore the need for the communicaiton strategy of the Directorate of Broadcasting in communicating it. This study aims to describe and evaluate communication strategies in communicating the Directorate of Broadcasting and regulation of broadcasting policy of th elicensing process. Methodological research is using the paradigm constructivist on a qualitative approach that is descriptive and social strategies constuctsionism. The result of the research found that communication strategic are routinely implemented in accordance with the existing plan. Concluded that communication strategies are already good, but the implementation is not optimal due to licensing constraints of Indonesia?s vast territory, the lack of human resources directorate of broadcasting, the difficulty of the coordination and the lack of IT-Based on database system.